

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA

Rinto Sahdan
Asrudin Hormati
Jumiati Irham

jumiatiirham2730@gmail.com
Universitas Khairun, Ternate

JIAKu

Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan

Issn

2963-671X

DOI

10.24034/jiaku.v3i2.6445

Key word:

Effectiveness,
Efficiency,
Independence,
Compatibility, Growth

Abstract

This research aims to provide information to the public regarding the presentation of financial statements and the performance of local governments in realizing accountability. As well as knowing the performance of the local government of Sula Islands Regency by using the APBD financial ratio, especially the effectiveness ratio, efficiency ratio, independence ratio and harmony ratio, and growth ratio. The type of data used in this study is quantitative data. The data is documentation of the 2019-2021 APBD financial statements. The object of the research used is the Regional Government of Sula Islands Regency, namely the Regional Asset Management Revenue Office. The results of the research show that the analysis of financial ratios in the regional revenue and expenditure budget for the 2019-2022 fiscal year as measured through the effectiveness ratio of the 2019-2022 fiscal year is quite effective, the efficiency ratio of the 2019-2022 fiscal year is quite efficient, the independence ratio of the 2019-2012 fiscal year is very low, the compatibility ratio of the 2019-2022 fiscal year which explains that the results of the operating expenditure ratio are prioritized compared to the capital expenditure ratio, and the growth ratio of regional original income, revenue growth ratio, operating expenditure growth ratio, and capital expenditure growth, there is a fluctuating increase from 2019-2022.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai penyajian laporan keuangan dan kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan pertanggungjawaban. Serta mengetahui kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula dengan menggunakan rasio keuangan APBD khususnya rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio kemandirian dan rasio keserasian, dan rasio pertumbuhan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data tersebut merupakan dokumentasi dari laporan keuangan APBD Tahun 2019-2021. Objek penelitian yang digunakan adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula yaitu Dinas Pendapatan Pengelolaan Aset Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis rasio keuangan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk tahun anggaran 2019-2022 yang diukur melalui rasio efektivitas tahun anggaran 2019-2022 cukup efektif, rasio efisiensi tahun anggaran 2019-2022 cukup efisien, rasio kemandirian tahun anggaran 2019-2012 sangat rendah, rasio keserasian tahun anggaran 2019-2022 yang menjelaskan bahwa hasil rasio belanja operasi lebih diprioritas dibandingkan dengan rasio belanja modal, dan rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah, rasio pertumbuhan pendapatan, rasio pertumbuhan belanja operasi, dan pertumbuhan belanja modal, adanya peningkatan yang berfluktuasi dari tahun 2019-2022.

Kata kunci:

Efektivitas, Efisiensi,
Kemandirian,
Keserasian,
Pertumbuhan

PENDAHULUAN

Saat ini penyelenggaraan pemerintah di Indonesia tidak lagi menggunakan sistem sentralisasi, tetapi telah beralih ke desentralisasi. Hal tersebut ditujukan untuk memudahkan pemberian pelayanan kepada masyarakat dan memberikan hak kepada pemerintah daerah untuk secara leluasa mengatur daerahnya masing-masing sesuai dengan prinsip daerah otonomi. Tujuan utama dari menjalankan otonomi daerah adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta meningkatkan layanan tersebut dimasa yang akan datang. Peningkatan pelayanan tersebut akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam menjalankan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan yang efektif dan efisien, sehingga mampu mendorong masyarakat untuk berperan serta

dalam melaksanakan pembangunan. Pemerintah daerah juga dituntut untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan, sehingga dapat mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki masing-masing daerah. Tuntutan yang tinggi terhadap kinerja dan akuntabilitas kinerja daerah ini berjuang pada kebutuhan pengukuran kinerja pemerintah daerah. Untuk itu, pemerintah dituntut untuk mampu membangun ukuran kinerja yang baik (Pilat dan Morasa, 2017).

Demi meraih keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah berusaha sebaik mungkin dalam hal peningkatan kinerja untuk mengelola keuangan. Anggaran yang sudah dikelola oleh pemerintah daerah selanjutnya dibuat laporan pertanggung jawaban setiap periode untuk menerapkan prinsip akuntabilitas dan juga transparansi dalam bentuk laporan keuangan daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan berperan untuk memberikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan transaksi selama satu tahun periode pelaporan.

Laporan keuangan pemerintah daerah adalah suatu alat pengendalian dan evaluasi kinerja bagi pemerintah daerah secara keseluruhan maupun unit-unit kerja di dalamnya (Mahmudi, 2010). Fungsi utama dari laporan keuangan pemerintah daerah adalah memberikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan (Pramono, 2014).

Analisis kinerja keuangan bertujuan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja pemerintah, mengukur potensi atau sumber ekonomi, mengetahui kondisi keuangan, mengetahui keuangan pemerintah dalam memenuhi kewajibannya, dan meyakini bahwa pemerintah telah melaksanakan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu alat menganalisis kinerja keuangan adalah dengan rasio keuangan (Mahmudi, 2010). Penggunaan analisis rasio pada sektor publik, khususnya terhadap APBD dan realisasinya belum banyak dilakukan sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah peraturannya.

Kabupaten Kepulauan Sula dibentuk berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Kepulauan Sula. Bahwa maksud dari pembentukan Kabupaten Kepulauan Sula diharapkan akan dapat mendorong peningkatan pelayanan dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta memberikan kesempatan wilayah-wilayah berpotensi dan layak untuk berkembang. Kabupaten Kepulauan Sula merupakan daerah otonomi yang dalam desentralisasi tidak hanya menerima dana dari pemerintah pusat tetapi juga mengelola sumber PAD sendiri. Sumber PAD Kabupaten Kepulauan Sula berasal dari sumber pendapatan daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan pendapatan lainnya.

Sumber PAD Kabupaten Kepulauan Sula berasal dari sumber pendapatan daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan pendapatan lainnya. Berdasarkan realisasi anggaran Kabupaten Kepulauan Sula dapat disimpulkan pada tahun 2019-2022 PAD mengalami kenaikan pada setiap tahunnya.

Tahun 2019, PAD Kabupaten Kepulauan Sula mencapai Rp23.750.919.919,70. Tahun 2020 PAD Kabupaten Kepulauan Sula mengalami kenaikan menjadi Rp28.258.251.694,00, kemudian pada tahun 2021 naik dengan dengan nilai PAD sebesar Rp29.604.095.641,00, dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan kenaikan sebesar Rp30.957.557.681,00. Total belanja naik turun setiap tahunnya pada tahun 2019 total belanja mencapai Rp757.294.104.058,12, pada tahun 2020 mengalami penurunan Rp688.664.276.614,44. Selain itu, total belanja tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi Rp812.796.706.918,43 dan tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp746.899.828.774,00.

Dilihat dari penjelasan di atas terkait Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula dalam mengelola keuangan daerahnya, yang menjadi latar belakang masalah di atas, tujuan penelitian ini

yakni untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula dari Tahun 2019-2022 jika berdasarkan rasio keuangan yaitu dari rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio kemandirian, rasio keserasian, dan rasio pertumbuhan.

TINJAUAN TEORETIS

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 mendefinisikan laporan keuangan adalah laporan terstruktur mengenai status keuangan dan transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan. Bastian (2005) menjelaskan bahwa laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan.

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran merupakan salah satu laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban yang berisikan mengenai informasi dari pendapatan, belanja, dan juga pembiayaan yang nantinya akan dibandingkan antara realisasi yang ada dengan anggaran yang ditetapkan. Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, laporan realisasi anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber dana ekonomi yang dikelola pemerintah pusat maupun daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan periode tertentu.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Asri (2016) menyatakan bahwa penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan dengan menggunakan data anggaran, informasi ekonomi maupun informasi keuangan. Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan secara baik dan benar (Fahmi, 2014).

Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja adalah kegiatan organisasi khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang ditetapkan (Mahsun, 2013). Pemilihan indikator, ukuran kinerja dan penetapan target untuk setiap ukuran ini merupakan upaya kongkrit dalam memformulasikan tujuan strategi organisasi sehingga lebih berwujud dan terukur. Pengukuran kinerja merupakan suatu proses untuk mengetahui apakah ukuran yang dilakukan telah mencapai target yang telah ditentukan (Indrayani dan Khairunnisa, 2019).

Ada beberapa cara untuk mengukur kinerja keuangan daerah salah satunya yaitu dengan menggunakan rasio kinerja keuangan daerah. Jenis rasio keuangan yang digunakan oleh penelitian ini dalam mengukur kinerja pemerintah daerah adalah sebagai berikut.

Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan (Mahmudi, 2010). Rasio ini berisi perbandingan antara realisasi PAD dan anggarannya. Kemampuan daerah dikatakan efektif, apabila rasio efektivitas bernilai besar minimal 100%. Tabel 1 menampilkan kriteria rasio efektivitas keuangan daerah.

Tabel 1
Kriteria Rasio Efektivitas

| Persentase Kinerja Keuangan | Kriteria |
|-----------------------------|----------------|
| >100% | Sangat Efektif |
| 90% - 100% | Efektif |
| 80% - 90% | Cukup Efektif |
| 60% - 80% | Kurang Efektif |
| <60% | Tidak Efektif |

Sumber: Susanto (2014)

Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja keuangan pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 100%. Semakin rendah nilai rasio efisiensi menunjukkan semakin baik kinerja pemerintah daerah (Maulina dan Rhea, 2019). Tabel 2 menunjukkan standar rasio efisiensi keuangan daerah.

Tabel 2
Kriteria Rasio Efisiensi

| Persentase Kinerja Keuangan | Kriteria |
|-----------------------------|----------------|
| >100% | Tidak Efisien |
| 90% - 100% | Kurang Efisien |
| 80% - 90% | Cukup Efisien |
| 60% - 80% | Efisien |
| <60% | Sangat Efisien |

Sumber: Susanto (2014)

Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian keuangan daerah menggambarkan seberapa baik pemerintah daerah dapat mendanai kegiatan pemerintahannya dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat. Semakin tinggi tingkat kemandirian semakin rendah ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan dari pihak ke tiga. Tabel 3 menunjukkan tingkatan kriteria dalam rasio kemandirian.

Tabel 3
Kriteria Rasio Kemandirian

| Persentase Kemandirian | Kemampuan Keuangan | Pola Hubungan |
|------------------------|--------------------|---------------|
| 0% - 25% | Rendah Sekali | Instruktif |
| 25% - 50% | Rendah | Konsultatif |
| 50% - 75% | Sedang | Partisipatif |
| 75% - 100% | Tinggi | Delegatif |

Sumber: Azhari (2017)

Rasio Keserasian

Rasio keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunannya secara optimal yaitu rasio belanja operasi dan rasio belanja modal. Rasio belanja operasi merupakan perbandingan antara total belanja operasi dengan total belanja daerah. Rasio ini menginformasikan laporan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi. Pada umumnya proporsi belanja operasi mendominasi total belanja daerah, yaitu antara 60-90%.

Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif (Mahmudi, 2010). Rasio pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai selama beberapa periode (Halim, 2007).

Penilaian Kerja

Penilaian kerja adalah suatu proses atau sistem yang digunakan untuk menentukan nilai kuantitatif sesuatu objek, perkara atau keadaan. Nilai kuantitatif biasanya dinyatakan dalam suatu unit angka yang

tetap dengan menggunakan alat pengukuran yang berkaitan. Kinerja dapat digambarkan sebagai suatu kegiatan atau program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategi suatu organisasi. Sedangkan penilaian kerja merupakan proses mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian misi melalui hasil-hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa ataupun proses (Bastian, 2005).

Penelitian Terdahulu

Purwanti (2021) menunjukkan hasil bahwa kinerja keuangan pada pemerintah daerah tahun 2014-2018 ditinjau dari rasio APBD. Purwanti (2021) menemukan bahwa berdasar rasio keuangan APBD maka kinerja keuangan pemerintah daerah baik jika dilihat dari rasio pertumbuhan, rasio efektivitas dan rasio efisiensi. Namun dapat dikatakan kurang baik apabila dilihat dari rasio kemandirian dan rasio keserasian.

Pramono (2014) menemukan juga bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Surakarta tahun 2010 dan 2011 serta untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas Pemerintah Kota Surakarta dalam mengelola sumber dayanya. Pramono (2014) menemukan bahwa kinerja Pemerintah Kota Surakarta yang masih kurang adalah di aspek kemandirian dan aspek keserasian.

Nurhayati (2015) menunjukkan bahwa kinerja keuangan Daerah Pemkab Soppeng, gambaran efisiensi PAD Pemkab Soppeng selama 2003-2010, dan kinerja keuangan daerah Pemkab Soppeng berpengaruh signifikan terhadap efisiensi penggunaan PAD. Nurhayati (2015) menemukan kinerja keuangan daerah Pemkab Soppeng dalam delapan tahun terakhir terbukti baik.

Assidiqi (2016) menunjukkan hasil yang sama bahwa kinerja keuangan Kabupaten Klaten tahun 2008-2012 secara umum dapat dikatakan baik, meskipun tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat semakin tinggi dan pemungutan pajak daerah masih belum efisien. Hasil kinerja keuangan belanja daerah secara umum dapat dikatakan baik, tetapi dalam keserasian belanja belum terjadi keseimbangan antara belanja operasi dan belanja modal.

METODE PENELITIAN

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data tersebut merupakan dokumentasi dari laporan keuangan APBD Tahun 2019-2021. Lokasi penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, yaitu Dinas Pendapatan Pengelolaan Aset Daerah.

Data dikumpulkan melalui penelusuran data kuantitatif dengan metode dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan sumber-sumber data dokumen seperti laporan keuangan APBD Tahun 2019-2021. Teknik analisa data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif yaitu melakukan perhitungan-perhitungan terhadap data keuangan yang diperoleh untuk memecahkan masalah yang ada sesuai dengan tujuan penelitian. Perhitungan masing-masing rasio keuangan tersebut dengan rumus sebagai berikut.

Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkn dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi rill daerah satuan ukurnya dinyatakan dalam persentase (%).

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi merupakan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima satuan ukur dinyatakan dalam persentase (%).

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan}} \times 100\%$$

Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian daerah adalah perbandingan antara pendapatan asli daerah dan realisasi pendapatan transfer satuan ukur dinyatakan dalam persentase (%).

$$\text{Rasio Kemandirian Daerah} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Realisasi Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

Rasio Keserasian

Rasio keserasian merupakan perbandingan antara belanja rutin dengan belanja total APBD, satuan ukurnya dinyatakan dalam persentase (%).

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100$$

Merupakan perbandingan antara, total belanja modal dengan total belanja daerah, satuan ukurnya dinyatakan dalam persentase (%).

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Rasio Pertumbuhan

Cara mengukur tingkat pertumbuhan adalah dengan membandingkan selisih antara pendapatan periode tertentu dengan periode sebelumnya dengan pendapatan tahun sebelumnya. Satuan ukur dinyatakan dalam persentase (%)

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\text{Pendapatan Tahun } n - \text{Pendapatan Tahun } (n-1)}{\text{Pendapatan Tahun } (n-1)} \times 100\%$$

ANALISIS DAN PEMBAHASAN**Rasio Efektivitas**

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Tabel 4 menunjukkan hasil perhitungan rasio efektivitas terjadi fluktuasi hal ini terlihat pada tahun 2019 rasio efektivitas sebesar 142,45%, menurun pada tahun 2020 menjadi 86,53%, dan pada tahun 2021 rasio efektivitas kembali mengalami penurunan sebesar 54,77%, sedangkan pada tahun 2022 rasio efektivitas meningkat menjadi sebesar 74,87%. Demikian dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula pada tahun 2019 sangat efektif dalam mengelola pendapatan asli daerahnya. Tetapi jika dilihat pada tahun 2021 kriteria rasio efektivitas menjadi tidak efektif karena hasil persentasinya kurang dari 60%. Hal ini menyimpulkan bahwa pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula pada tahun 2021 tidak efektif dalam mengelola pendapatan asli daerahnya, tetapi jika dilihat dari nilai rata-rata 89,66% Kabupaten Kepulauan Sula dalam mengelola pendapatan asli daerah “Cukup Efektif” karena berada digaris intruktif 80%-90%.

Tabel 4
Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas

| Tahun | Realisasi Penerimaan PAD | Target Anggaran PAD | Rasio Efektivitas |
|------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|
| 2019 | 33.834.314.579,22 | 23.750.919.919,70 | 142,45% |
| 2020 | 24.453.262.874,71 | 28.258.251.694,00 | 86,53% |
| 2021 | 16.212.822.319,89 | 29.604.095.641,00 | 54,77% |
| 2022 | 23.178.736.296,60 | 30.957.557.681,00 | 74,87% |
| Rata-Rata | | | 89,66% |

Sumber: data sekunder diolah (2023)

Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Pemerintah daerah dikatakan

efisien jika rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100 persen. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik.

Tabel 5
Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi

| Tahun | Realisasi Belanja Daerah | Realisasi Penerimaan Pendapatan | Rasio Efisiensi |
|------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------|
| 2019 | 691.645.063.166,42 | 810.842.566.731,22 | 85,30% |
| 2020 | 655.458.756.812,23 | 737.183.614.749,71 | 88,91% |
| 2021 | 660.508.678.069,80 | 691.327.966.764,89 | 95,54% |
| 2022 | 687.639.521.409,36 | 822.241.305.276,60 | 83,63% |
| Rata-Rata | | | 88,35% |

Sumber: data sekunder diolah (2023)

Tabel 5 menunjukkan bahwa rasio efisiensi keuangan daerah BPKAD Kabupaten Kepulauan Sula berfluktuasi terlihat pada tahun 2019 rasio efisiensinya sebesar 85,30%, meningkat pada tahun 2020 menjadi 88,91%, pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar menjadi 95,54%, sedangkan pada tahun 2022 menurun menjadi 83,63%. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula dalam mengelola pendapatan asli daerah sudah "cukup efisien." Hal ini dapat dilihat pada tabel 5 rasio efisiensi dengan nilai rata-rata sebesar 88,35% maka rasio efisiensi Kabupaten Kepulauan Sula dikatakan "cukup efisien" karena rasio efisiensi berada digaris instruktif 80% - 90%.

Rasio Kemandirian

Rasio Kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah menggambarkan bahwa kesejahteraan masyarakat semakin tinggi.

Tabel 6
Hasil Perhitungan Rasio Kemandirian

| Tahun | Realisasi PAD | Realisasi Pendapatan Transfer | Rasio Kemandirian (%) |
|------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 2019 | 33.834.314.579,22 | 749.117.406.152,00 | 4,52% |
| 2020 | 28.258.251.694,00 | 693.630.127.175,00 | 4,07% |
| 2021 | 29.604.095.641,00 | 649.880.881.807,00 | 4,56% |
| 2022 | 30.957.557.681,00 | 779.721.338.980,00 | 3,97% |
| Rata-Rata | | | 4,28% |

Sumber: data sekunder diolah (2023)

Tabel 6 menunjukkan bahwa nampak Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula tingkat kemandiriannya berfluktuasi. Hal ini terlihat pada tahun 2019 rasio kemandiriannya 4,52%, menurun pada tahun 2020 menjadi 4,07%. Sedangkan pada tahun 2021 rasio kemandirian meningkat menjadi 4,56% dan pada tahun 2022 rasio kemandirian mengalami penurunan sebesar 3,97%. Tetapi jika dilihat tabel 6 tingkat rasio kemandirian daerah dilihat dari nilai rata-rata 4,28%, maka Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula untuk tahun 2019 sampai tahun 2022 tingkat kemampuan keuangannya masih rendah sekali karena rasio kemandirian berada digaris instruktif 0% - 25%.

Rasio Keserasian

Rasio keserasian merupakan rasio yang mendeskripsikan aktifitas pemerintah daerah dalam memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin

tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja investasi yang dipakai untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat semakin kecil.

Tabel 7
Perhitungan Rasio Keserasian

| Tahun | Belanja | | Total Belanja Daerah | Rasio Keserasian | |
|-------|-----------------------|---------------------|----------------------|------------------|---------------|
| | Total Belanja Operasi | Total Belanja Modal | | Operasi | Modal |
| 2019 | 579.434.357.789,10 | 176.004.746.269,02 | 757.294.104.058,12 | 76,51% | 23,24% |
| 2020 | 579.434.357.789,10 | 110.838.496.265,80 | 688.664.276.614,44 | 84,14% | 16,09% |
| 2021 | 579.434.357.789,10 | 112.104.780.816,00 | 812.796.706.918,43 | 71,29% | 13,79% |
| 2022 | 579.434.357.789,10 | 144.015.958.689,00 | 746.899.828.774,00 | 77,58% | 19,28% |
| | Rata-Rata | | | 77,38% | 18,10% |

Sumber: data sekunder diolah (2023)

Tabel 7 menunjukkan bahwa sebagian besar dana yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula didominasi rasio belanja operasi, rasio yang didapatpun tidak stabil. Walaupun begitu, rasio belanja operasi masih ada di atas rasio belanja modal karena hasil yang didapatkan masih di atas 70% dari total belanja keseluruhan. Hal ini akan berpengaruh terhadap rasio belanja modal yang diperoleh yaitu masih dibawah 20%. Jika dirata-ratakan maka dari tahun 2019-2022 rasio belanja operasi mendapatkan hasil sebesar 77,38%, sedangkan untuk belanja modal rasio yang didapatkan adalah sebesar 18,10%.

Alasannya karena sebagian besar dana yang dimiliki pemerintah masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi, jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai. Sedangkan rendahnya rasio belanja modal yang dihasilkan menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sula belum sepenuhnya memprioritaskan anggaran untuk kegiatan pembangunan daerah dalam hal ini adalah penyediaan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat dan juga pelayanan publik.

Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai selama beberapa periode (Halim, 2007). Jika pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran sudah diketahui, maka dapat digunakan untuk menilai potensi mana yang perlu mendapat perhatian.

Tabel 8
Hasil Perhitungan Rasio Pertumbuhan Pendapatan

| Tahun | Anggaran PAD | Total Pendapatan | Rasio Pertumbuhan PAD | Rasio Pertumbuhan Pendapatan |
|-------|-------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------|
| 2019 | 23.750.919.919,70 | 805.008.877.936,70 | | |
| 2020 | 24.453.262.874,71 | 741.590.213.927,00 | 2,96% | -7,88% |
| 2021 | 16.212.822.319,89 | 781.741.450.718,00 | -33,70% | 5,41% |
| 2022 | 23.178.736.296,60 | 804.603.161.758,00 | 42,97% | 3,00% |
| | Rata-Rata | | 4,07% | 0,18% |

Sumber: data sekunder diolah (2023)

Tabel 8 menunjukkan bahwa PAD Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2020 mengalami pertumbuhan positif sebesar 2,96%. Demikian untuk total pendapatan di tahun 2020 mengalami pertumbuhan negatif sebesar -7,88%. Tetapi tahun 2021 pertumbuhan PAD mengalami pertumbuhan negatif sebesar -33,70%. Demikian untuk total pendapatan di tahun 2021 mengalami pertumbuhan positif 5,41%. Tahun 2022, Kabupaten Kepulauan Sula pertumbuhan PAD mengalami pertumbuhan positif sebesar 3,00%.

Tabel 9
Hasil Perhitungan Rasio Pertumbuhan Belanja

| Tahun | Belanja Operasi | Belanja Modal | Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi | Rasio Pertumbuhan Belanja Modal |
|-------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 2019 | 579.434.357.789,10 | 176.004.746.269,02 | | |
| 2020 | 541.967.231.448,64 | 110.838.496.265,80 | -6,47% | -3,70% |
| 2021 | 544.160.021.413,43 | 112.104.780.816,00 | 0,40% | 1,14% |
| 2022 | 597.663.870.085,00 | 144.015.958.689,00 | 9,83% | 28,47% |
| | Rata-Rata | | 1,26% | 8,64% |

Sumber: data sekunder diolah (2023)

Tabel 9 menunjukkan bahwa pertumbuhan belanja operasi mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 2020 sebesar -6,47% dan untuk pertumbuhan belanja modal juga mengalami pertumbuhan negatif sebesar -3,70%. Tahun 2021, pertumbuhan belanja operasi mengalami pertumbuhan positif cukup rendah sebesar 0,40%. Demikian juga, pertumbuhan belanja modal mengalami pertumbuhan positif yang rendah juga sebesar 1,14%. Tahun 2022, pertumbuhan belanja operasi mengalami pertumbuhan positif sebesar 9,83% dan demikian juga pertumbuhan belanja modal mengalami pertumbuhan sebesar 28,47%.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2019-2022 cukup bagus dilihat dari rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio pertumbuhan PAD. Kinerja keuangan daerah dilihat dari beberapa rasio dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Kinerja keuangan daerah Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2019-2022 jika dilihat dari rasio efektivitas PAD tergolong cukup efektif. Hal ini dikarenakan penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah melebihi yang dianggarkan; (2) Kinerja keuangan daerah Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2019-2022 jika dilihat dari rasio efisiensi keuangan daerah tergolong cukup efisiensi. Hal ini menggambarkan kinerja pemerintah daerah dalam pemungutan PAD sudah efisien hal ini terlihat dengan mengeluarkan biaya yang relatif sedikit, pemerintah daerah dapat menghasilkan *output* (hasil) yang optimal dan memberikan gambaran kinerja pemerintahan daerah yang sudah baik; (3) Kinerja keuangan daerah Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2019-2022 jika dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah masih tergolong rendah sekali. Hal ini menggambarkan kinerja masih sangat rendah sehingga memiliki ketergantungan tinggi terhadap bantuan pemerintah pusat dibandingkan pemerintah daerah; (4) Kinerja keuangan daerah Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2019-2022 jika dilihat dari rasio keserasian masih memprioritaskan pengalokasian dana untuk belanja operasi dibandingkan dengan belanja modal. Hal ini ditandai dengan masih tinggi biaya yang dikeluarkan untuk belanja operasi dalam pemenuhan kebutuhan belanja pegawai; (5) Kinerja keuangan daerah Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2019-2022 jika dilihat dari rasio pertumbuhan PAD tumbuh secara positif.

DAFTAR PUSTAKA

- Asri, J. D. (2016). Perbandingan kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2009-2013. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 4(2), 1021-1034. <https://doi.org/10.17509/jrak.v4i2.4037>.
- Assidiqi, B. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klaten Tahun 2008-2012. *Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi*, 4(5), 1-11. <https://journal.student.uny.ac.id/index.php/profita/article/view/5811>.
- Azhari, F. R. (2017). Analisis Tingkat Kemandirian, Efektivitas, Efisiensi pendapatan asli daerah (PAD) Pada Pemerintah Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat. *Tugas Akhir*. Politeknik Negeri Bandung. <https://digilib.polban.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jbptppolban-gdl-fikrirezaa-7211>.

- Bastian, I. (2005). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Fahmi, I. (2014). *Analisis Kinerja Keuangan*. Bandung: Alfabeta.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Indrayani, I., dan Khairunnisa, K. (2019). Analisis Pengukuran Kinerja Dengan Menggunakan Konsep Value for Money Pada Pemerintah Kota Lhokseumawe: (Studi Kasus Pada Dpkad Kota Lhokseumawe Periode 2014-2016). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 6(1), 1-10. <https://doi.org/10.29103/jak.v6i1.1820>.
- Mahmudi. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YPKN.
- Mahsun, M. (2013). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPF.
- Maulina, F., dan Rhea, R. (2019). Analisis Rasio Keuangan untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat). *Jurnal OBIS: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1), 11–22. <http://jurnal.polteq.ac.id/index.php/obis/article/view/30>.
- Nurhayati. (2015). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, 4(1), 55–66. <https://e-journal.upp.ac.id/index.php/Cano/article/view/394>.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)*.
- Pilat, J. J., dan Morasa, J. (2017). Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Manado untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Manado Tahun Anggaran 2011-2015. *Accountability*, 6(1), 45-56. <https://doi.org/10.32400/ja.16026.6.1.2017.45-56>.
- Pramono, J. (2014). Analisis Rasio Keuangan untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Among Makarti*, 7, 83–112. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.52353/ama.v7i1.97>.
- Purwanti, E. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah kota Salatiga Tahun 2014-2018. *Jurnal Among Makarti*, 14(2), 1-12. <http://dx.doi.org/10.52353/ama.v14i2.213>.
- Susanto, H. (2014). Analisis Perkembangan Kinerja Keuangan Daerah dalam Upaya Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Seminar Nasional UT 2014, 23 Oktober 2014, Universitas Terbuka Convention Center (UTCC)*. <https://repository.ut.ac.id/4962/>.
- Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang *Pemerintah Daerah*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47413/uu-no-5-tahun-1974>.